

BAB II

TRANSFORMASI, TANTANGAN, DAN STRATEGI KEBIJAKAN MIGRASI PENDIDIKAN DI AUSTRALIA

Australia telah lama dikenal sebagai negara tujuan migrasi, termasuk dalam sektor pendidikan. Perkembangan kebijakan imigrasinya, dari era *White Australia Policy* hingga pendekatan multikultural, turut membentuk sistem migrasi pendidikan yang terbuka dan kompetitif. Sebagai salah satu destinasi studi utama di dunia, Australia menarik banyak mahasiswa internasional karena reputasi akademik, kualitas hidup, dan peluang kerja. Bab ini akan membahas dinamika migrasi pendidikan di Australia, tantangan dalam pengelolaannya, serta strategi awal yang diambil sebelum lahirnya kebijakan Genuine Student Test.

2.1 Sejarah Kebijakan Imigrasi Australia

2.1.1 Awal Mula Kebijakan Imigrasi di Australia

Setelah berakhirnya Perang Dunia II (1939–1945), Australia menghadapi kenyataan pahit berupa krisis populasi dan kekurangan tenaga kerja (National Museum of Australia, 2022). Dalam situasi seperti ini, kebijakan terbuka terhadap kedatangan imigran bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Istilah yang terkenal dari Arthur Calwell, yaitu “populate or perish”, mencerminkan urgensi peningkatan populasi Australia untuk mencegah stagnasi atau kemunduran pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuka diri terhadap imigran dari berbagai latar belakang, meskipun kebijakan *White Australia* masih membayangi. Jika diskriminasi tetap

dipertahankan, krisis populasi akan memburuk dan menghambat pertumbuhan ekonomi. (Sabrina et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Ayu Sabrina (2022), fenomena migrasi ke Australia selama abad ke-20 dibagi ke dalam tiga gelombang besar, masing-masing mencerminkan arah kebijakan dan situasi sosial yang berbeda. Gelombang pertama dimulai pada 1901, saat diberlakukannya *Immigration Restriction Act* yang menjadi landasan *White Australia Policy*. Secara historis, kebijakan ini muncul sebagai hasil perpaduan antara nasionalisme rasial dan kepentingan ekonomi. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terdapat dorongan kuat untuk melindungi standar ketenagakerjaan Australia serta mempertahankan keaslian ras mereka. Prinsip “truly Australians” menjadi justifikasi kebijakan ini, di mana prinsip ini dijadikan standar untuk mempertahankan ras kulit putih sebagai identitas bangsa. Kebijakan ini secara khusus menargetkan imigran non-Eropa, terutama dari Asia, Afrika, dan Pasifik, sebagai pihak imigran yang perlu dibatasi. Pada masa ini, negara secara eksplisit menolak kedatangan imigran non-kulit putih sebagai upaya mempertahankan identitas nasional yang didefinisikan secara rasial. Namun, kebijakan ini mendapat banyak kritik, terutama dari negara Asia, karena dirasa begitu eksklusif. Dampak yang terjadi jika kebijakan ini terus berlanjut yaitu, Australia berpotensi kekurangan populasi karena adanya pembatasan ras dan etnis, sehingga mempengaruhi imigrasi dan demografi negara ini (Miller, 1999).

Situasi mulai berubah pada periode kedua, yaitu tahun 1950–1970-an, di mana kebijakan *White Australia* perlahan mulai melemah pasca Perang Dunia II. Pada era ini, Australia mengalami transformasi kebijakan imigrasi, karena negara ini mulai membuka diri terhadap imigran non-kulit putih, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori *displaced persons*, yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya karena konflik, perang, atau pelanggaran hak asasi manusia. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara Eropa seperti Jerman dan Italia tiba di Australia sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca perang dan penguatan basis tenaga kerja (Ongley & Pearson, 1995). Selain melalui program pengungsi, kedatangan imigran juga dipercepat dengan berbagai perjanjian bilateral dan skema migrasi bersponsor yang memfasilitasi arus masuk migran Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan seperti *Assisted Passage Scheme* dan *Employment of Scientific and Technical Enemy Aliens Scheme*, yang memberikan kontrak kepada praktisi dan ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk membantu kemajuan Australia berupa distribusi ilmu pengetahuan dan pembangunan industri (Sabrina et al., 2022). Pemerintah Australia melakukan upaya-upaya tersebut dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi negara melalui peningkatan jumlah tenaga kerja guna mendorong pertumbuhan (Ongley & Pearson, 1995). Oleh karena itu, sepanjang periode ini Australia berhasil melakukan *population-building*, di mana jumlah populasi bertumbuh secara masif, yang kemudian berkontribusi besar dalam tenaga kerja nasional.

Perubahan paling signifikan terjadi pada gelombang ketiga, yakni pasca-1970-an, ketika Australia secara resmi menghapus *White Australia Policy* dan menggantinya dengan *Universal Migration Policy*, yang mana kebijakan ini memberikan hak dan peluang bagi migran dari berbagai latar belakang. Tepatnya pada tahun 1973, Pemerintah Australia mulai secara resmi menerapkan kebijakan multikulturalisme (Mason, 2010). Pergeseran ini mencerminkan komitmen baru terhadap inklusivitas, sebagaimana tercermin dalam prinsip “a multicultural society for the future” dan terlahirlah masyarakat Australia yang heterogen (Sabrina et al., 2022). Dengan pendekatan ini, imigrasi tidak lagi dibatasi oleh warna kulit, agama, atau ras, melainkan lebih berfokus pada kompetensi dan keterampilan profesional. Oleh karena itu, pada era ini Pemerintah Australia mulai memperkenalkan sistem poin, di mana imigran yang ingin bekerja di Australia akan diberikan penilaian berdasarkan kategori tertentu sebagai standar kualifikasi tenaga kerja (Miller, 1999). Selain itu, Pemerintah Australia juga mulai mempromosikan sektor pendidikannya ke ranah internasional, yang mana hal ini membuat lonjakan masuknya pelajar asing dari berbagai negara. Apalagi Australia juga tidak membatasi kesempatan para pelajar dari berbagai latar belakang, yang mana hal ini menjadikan industri pendidikan internasional menjadi salah satu ekspor terbesar Australia (Spinks, 2015).

Dalam dokumen *Migration Strategy* yang dirilis oleh Pemerintah Australia pada tahun 2023, dijelaskan bahwa sejak awal 2000-an Australia mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah migran, terutama migran

temporer. Berdasarkan data dalam laporan tersebut, jumlah pemegang visa temporer meningkat dari sekitar 700.000 orang pada tahun 2000 menjadi sekitar 2,2 juta orang pada tahun 2023, belum termasuk pengunjung dan pemegang visa transit (Department of Home Affairs, 2023a). Lonjakan ini tidak bersifat spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural dan kebijakan.

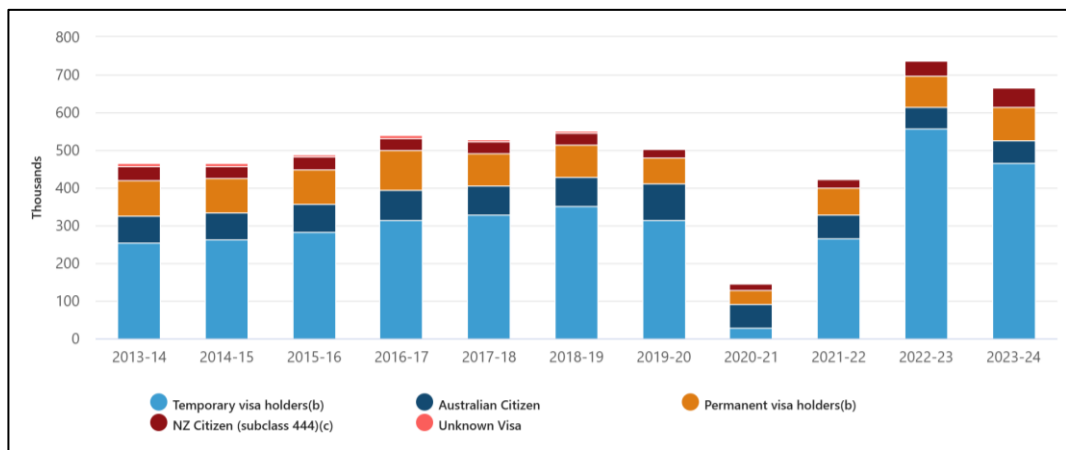
Salah satu faktor pendorong utamanya adalah kebijakan migrasi Australia yang semakin terbuka terhadap mobilitas internasional, baik untuk tujuan studi, kerja sementara, maupun tinggal permanen. Di samping itu, daya tarik Australia sebagai tujuan pendidikan dan lapangan kerja internasional juga menjadi *pull factor* utama. Berkembangnya sektor pendidikan internasional, ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa asing melalui skema visa pelajar dan visa kerja pasca-studi (*post-study work visa*), memperkuat arus migrasi ini (Australian Government, 2019).

Namun, dinamika ini sempat terganggu oleh pandemi COVID-19. Pemerintah Australia merespons dengan menerapkan sejumlah kebijakan darurat, termasuk perpanjangan masa berlaku visa dan relaksasi ketentuan imigrasi. Kebijakan tersebut memungkinkan banyak migran untuk tetap tinggal di Australia meski terdapat pembatasan perjalanan internasional, yang pada akhirnya turut memengaruhi data migrasi secara keseluruhan (Guan et al., 2024). Selain karena kebijakan dan daya tarik pendidikan, lonjakan migrasi juga didorong oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor vital seperti

kesehatan, layanan publik, dan teknologi. Australia secara aktif merekrut migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di bidang-bidang tersebut.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi dan sosial, arus migrasi yang tinggi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Beberapa migran terpaksa bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian mereka, bahkan dalam pekerjaan berupah rendah, yang berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan memperlambat mobilitas ekonomi vertikal. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk migran memberikan tekanan terhadap infrastruktur publik, layanan kesehatan, sistem pendidikan, serta ketersediaan perumahan di kota-kota besar (Department of Home Affairs, 2023b). Gambar berikut menunjukkan tren kedatangan populasi migran di Australia selama periode 2013–2014 hingga 2023.

Grafik 2.1 Jumlah Kedatangan Imigran dari Tahun 2013-2024



Sumber: Australian Bureau of Statistic (2024)

Tren kedatangan internasional ke Australia dari 2013-2014 hingga 2023-2024 menunjukkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama pandemi COVID-19. Pada periode pra-pandemi (2013-2014 hingga 2019-2020), jumlah kedatangan meningkat stabil dari sekitar 460.000 menjadi puncaknya sekitar 540.000. Namun, menjelang akhir 2019-2020, terjadi penurunan menjadi 490.000, indikasi awal dampak pandemi yang mulai menyebar secara global.

Pandemi COVID-19 memicu kebijakan penutupan perbatasan paling ketat dalam sejarah Australia, yang tercermin dalam penurunan drastis kedatangan internasional akibat adanya *border restriction* pada 2020-2021 menjadi hanya 140.000 (Miranti T.V., 2021). Namun, setelah pembukaan kembali perbatasan pada akhir 2021, tren kedatangan langsung mengalami pemulihan signifikan. Pada 2021-2022, jumlah kedatangan melonjak ke 410.000, dan setahun berikutnya meningkat tajam hingga mencapai sekitar 730.000, jauh melampaui angka pra-pandemi. Lonjakan ini merupakan cerminan dari "efek membludak", di mana ratusan ribu orang yang menunda migrasi akibat pandemi, akhirnya datang serentak ketika perbatasan dibuka dan kebijakan pemerintah difokuskan pada pemulihan ekonomi. Memasuki 2023-24, angka kedatangan sedikit menurun menjadi sekitar 660.000, menandakan awal dari proses normalisasi setelah lonjakan ekstrem. (Guan et al., 2024).

Grafik yang menunjukkan peningkatan populasi imigran di Australia selama dua dekade terakhir mencerminkan betapa signifikan peran migrasi dalam membentuk demografi negara tersebut. Kenaikan ini tidak hanya menggambarkan daya tarik (*pull factors*) Australia sebagai tujuan pendidikan dan kerja, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kebijakan imigrasi yang terbuka telah mendorong arus masuk individu dari berbagai latar belakang. Selain itu, ada beberapa faktor utama yang menjadikan Australia sangat menarik bagi para migran. *Pertama*, Australia menawarkan kualitas hidup yang tinggi, tercermin dari posisinya yang konsisten dalam penilaian indeks global. Faktor seperti sistem kesehatan universal (*Medicare*), keamanan, *work-life balance*, dan kepuasan hidup (*life satisfaction*) menjadi daya tarik utama (OECD, 2020). *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang stabil, bahkan saat krisis global 2008, menciptakan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja terampil, membuka ruang bagi migran untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. *Ketiga*, komitmen Australia terhadap kebijakan multikulturalisme menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keragaman budaya. *Keempat*, di bidang pendidikan Australia memiliki World Class University dan potensi pengembangan karir (Locke, 2020). Kebijakan tersebut memperbolehkan mahasiswa internasional untuk tinggal dan bekerja setelah lulus, menjadikan pendidikan sebagai strategi migrasi jangka panjang (Australian Government, 2023b).

2.1.2 Perkembangan Sektor Pendidikan di Australia

Sejak dekade 1990-an, sektor pendidikan tinggi di Australia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, menjadikannya salah satu destinasi utama pendidikan internasional di dunia. Perkembangan ini mencerminkan dinamika transformasi struktural yang dipengaruhi oleh globalisasi pendidikan dan kebijakan strategis pemerintah Australia dalam mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi. Salah satu indikator paling menonjol dari transformasi ini adalah peningkatan jumlah mahasiswa internasional yang mencapai lebih dari 25% (Hugo, 2006). Tiga negara asal mahasiswa terbanyak adalah China, India, dan Indonesia, menunjukkan gencarnya promosi global dan kebijakan pemerintah yang mendukung ekspansi pendidikan internasional (Spinks, 2015).

Reputasi pendidikan Australia di tingkat global dibentuk oleh sejumlah faktor yang saling mendukung. Tingginya proporsi mahasiswa dan tenaga pengajar internasional menjadi simbol keterbukaan dan keberagaman sistem pendidikan tinggi Australia. Universitas-universitas terkemuka seperti University of Melbourne, Australian National University (ANU), dan University of Sydney secara konsisten berada dalam jajaran Top 100 universitas dunia menurut QS World University Rankings. Menurut Locke (2020), reputasi ini juga diperkuat oleh performa akademik yang ditunjukkan melalui tingkat sitasi tinggi serta kontribusi riset yang signifikan dalam berbagai bidang keilmuan.

Bagi mahasiswa internasional, daya tarik Australia tidak hanya terletak pada reputasi akademik yang tinggi, tetapi juga pada lingkungan belajar yang multikultural, fasilitas riset yang memadai, dan peluang pengembangan karir global (Hugo, 2006). Dengan kombinasi tersebut, Australia secara konsisten menempati posisi sebagai salah satu destinasi pendidikan yang paling diminati di dunia, mencerminkan keberhasilan kebijakan yang berfokus pada kualitas, inklusivitas, dan daya saing internasional. Peningkatan jumlah mahasiswa internasional ini bukan hanya berdampak pada ranah pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, yang mana di tahun 2008-2009 Australia mengalami peningkatan secara pesat dari sektor pendidikan (Spinks, 2015).

Namun, pertumbuhan tersebut juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait penguatan regulasi dan perlindungan integritas sektor pendidikan. Pemerintah Australia melakukan reformasi besar pada tahun 2010 dengan memisahkan jalur visa pelajar dari skema migrasi permanen untuk memastikan bahwa sektor pendidikan tidak disalahgunakan sebagai pintu masuk imigrasi ilegal (Spinks, 2015). Reformasi tersebut juga disertai peningkatan persyaratan terkait kemampuan bahasa Inggris dan ketentuan dana pendidikan mahasiswa. Oleh karena itu, di tahun 2011 pemerintahan Julia Gillard akhirnya meluncurkan kebijakan yang bernama Genuine Temporary Entrant (GTE) sebagai salah satu kebijakan imigrasi yang dijadikan asesmen untuk menempuh pendidikan di Australia, bukan untuk sebagai jalur residensi permanen (Reardon, 2024).

Dengan demikian, meskipun sektor pendidikan tinggi Australia tidak hanya berperan sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga menjadi instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi “*new engine of economic growth*”, yakni instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tanpa penyesuaian kebijakan, keunggulan Australia sebagai salah satu destinasi pendidikan utama dunia dapat tergerus oleh negara-negara pesaingnya seperti Kanada dan Inggris (Spinks, 2015).

2.2 Tantangan dan Strategi Kebijakan Imigrasi di Era Anthony Albanese

Dari yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Australia telah mengalami lonjakan kedatangan mahasiswa internasional di era tahun 2000-an. Selain itu, lonjakan meningkat secara signifikan pasca COVID-19 dikarenakan Australia mulai membuka keran imigrasi di perbatasannya, yang mana hal ini dapat menjadi celah untuk penyalahgunaan visa (Department of Home Affairs, 2023c). Departemen Dalam Negeri Australia memberikan atensinya atas fenomena ini karena tingginya kasus penyalahgunaan visa, yang berdasarkan situs laporan resminya, justru banyak melibatkan mahasiswa internasional sebagai pelaku utamanya (Department of Home Affairs, 2021).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan visa pelajar, yang sejatinya dirancang untuk mendukung sektor pendidikan, justru mulai dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan. Atas keresahan tersebut, Perdana Menteri Anthony Albanese (2022 – sekarang) telah menyoroti pentingnya transformasi kebijakan migrasi. Australia mengumumkan perubahan

kebijakan migrasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sistem pendidikan internasional dan migrasi negara ini. Salah satu fokus utama pemerintahannya adalah integritas sistem visa pelajar (Department of Home Affairs, 2023b).

Atas dasar tersebut, Departemen Dalam Negeri berinisiasi melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penyedia pendidikan yang memiliki riwayat masalah atau risiko penyalahgunaan visa. Hal ini termasuk mengidentifikasi dan menindak “*providers with poor track records*” (Department of Home Affairs, 2023c). Tak hanya itu, Pemerintah Australia juga menerapkan kebijakan Genuine Student Test (GST) sebagai bagian dari upaya memperketat seleksi terhadap motivasi kedatangan mahasiswa internasional ke Australia. Dalam dokumen berjudul *Migration Strategy at A Glance* yang dirilis oleh Departemen Dalam Negeri, disinggung bahwa salah satu program kerja pemerintah yaitu “*Strengthening the integrity and quality of international education*”. Kebijakan baru ini memperkenalkan serangkaian persyaratan ketat yang tidak hanya menargetkan pengawasan terhadap visa, tetapi juga membatasi mahasiswa yang berniat untuk tinggal lebih lama tanpa tujuan menjadi penduduk tetap.

Adanya kebijakan GST yang merupakan sistem penilaian baru yang diterapkan Pemerintah Australia sejak 23 Maret 2024 untuk menggantikan kebijakan sebelumnya, yakni Genuine Temporary Entrant (GTE) (Department of Home Affairs, 2023c). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pelamar visa pelajar yang memiliki *genuine intentions* untuk menempuh pendidikan di Australia, bukan sekadar menggunakan visa tersebut sebagai jalur imigrasi

sementara. Jika dibandingkan dengan GTE, kebijakan GST jauh lebih ketat dan mendalam. GST memuat serangkaian pertanyaan spesifik yang harus dijawab dalam formulir aplikasi visa pelajar, yang mencakup latar belakang pribadi, alasan memilih institusi dan program studi tertentu, serta rencana masa depan setelah menyelesaikan pendidikan. GTE, yang diterapkan pada era Perdana Menteri Julia Gillard, berfokus pada penekanan sifat tinggal sementara dan keinginan pelamar untuk kembali ke negara asal setelah studi, dengan penilaian yang sangat bergantung pada keterikatan pelamar terhadap negara asal mereka (Reardon, 2024). Tujuannya adalah untuk mencegah *permanently temporary*, yaitu penyalahgunaan visa pelajar sebagai jalur migrasi permanen atau tujuan bekerja (Department of Home Affairs, 2023b). Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan karena pertanyaannya tidak terstruktur secara sistematis sehingga digantikan dengan GST.

Dalam kerangka teori kebijakan publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk merespons dinamika sosial melalui perumusan kebijakan yang relevan. Seperti dikemukakan oleh Easton (1950), pemerintah merupakan aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan (*decision-making*) yang bertujuan menjawab kebutuhan dan tekanan publik. Kebijakan migrasi pendidikan yang diterapkan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem migrasi yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi dan sosial pasca-pandemi COVID-19. Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga ingin memastikan bahwa institusi pendidikan tetap menjaga standar kualitas dan tidak menjadi celah penyalahgunaan visa.

Transformasi kebijakan ini terlihat nyata melalui berbagai langkah tegas yang diambil oleh pemerintah. Di antaranya, kenaikan biaya visa pelajar dari AUD 710 menjadi AUD 1.600 yang mulai berlaku pada Juli 2024, larangan berpindah institusi dalam enam bulan pertama studi (visa hopping), pengetatan akses terhadap visa kerja pasca-studi, pembatasan konversi visa dari dalam negeri (visa onshore), serta penerapan Ministerial Direction 111 (MD111) yang memberikan kuota visa bagi institusi pendidikan berdasarkan performa dan reputasi masing-masing (Department of Home Affairs, 2023c; 2024d). Kebijakan ini secara eksplisit dimaksudkan untuk menekan angka migrasi pasca-pandemi yang melonjak signifikan dan turut menyumbang pada krisis perumahan serta penurunan integritas sektor pendidikan internasional (Department of Home Affairs, 2023c).

Dalam pengaplikasiannya, prosedur pengajuan visa pelajar masih mengikuti struktur sebelumnya, dengan beberapa tambahan perubahan. Pelamar harus terdaftar pada program yang terakreditasi CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students), memenuhi persyaratan akademik, kemampuan bahasa Inggris seperti IELTS dari 5.5 menjadi 6.0 untuk jenjang sarjana, dan dari 6.0 menjadi 6.5 untuk pascasarjana., dan kemampuan finansial AUD 29.710 (sekitar Rp300 juta), serta memiliki asuransi kesehatan OSHC. Aplikasi dilakukan secara daring melalui ImmiAccount, mencakup dokumen paspor, bukti pendaftaran, dana, hasil tes bahasa, surat pernyataan GST, serta pemeriksaan kesehatan dan karakter. Jika diterima, mahasiswa akan mendapat *offering letter*, setelah membayar biaya awal, memperoleh Confirmation of Enrolment (CoE), yang menjadi syarat utama untuk mengurus visa pelajar Subclass

500 (Australian Government, 2025a). Proses verifikasi dapat memakan waktu 4–12 minggu, namun bisa lebih lama jika institusi sudah hampir mencapai batas kuota menurut Ministerial Direction 111 (Department of Home Affairs, 2024d).

Meski pemerintah menyatakan kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kualitas pendidikan dan menyaring pelajar *non-genuine*, sektor pendidikan tinggi menilai kebijakan ini merusak reputasi global Australia dan mengancam kontribusi ekonomi sektor ini. Dalam jurnal *The Policy Implementation Process*, Smith menjelaskan bahwa kebijakan di negara-negara Barat umumnya bersifat inkremental, yaitu perubahan atau penyesuaian yang dilakukan secara bertahap dan sedikit berbeda dari kebijakan sebelumnya dalam bidang yang sama. Jika dilihat dalam konteks kebijakan imigrasi, Albanese melakukan perubahan kebijakan imigrasi yang sudah dijalankan dari era pemerintahan sebelumnya, namun tidak merombak kerangka kebijakan secara keseluruhan, tetapi Albanese melakukan penyesuaian dan pembaharuan pada era pemerintahannya.

Secara keseluruhan, perubahan syarat visa pelajar yang dilakukan oleh pemerintahan Albanese mencerminkan upaya sistematis untuk mengurangi arus migrasi, menanggapi tekanan perumahan, dan meningkatkan kualitas sektor pendidikan. Australia berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan reputasi globalnya sebagai destinasi pendidikan. Namun, efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap sektor pendidikan dan perekonomian masih menjadi perdebatan.